



Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 (Studi Pada Anggota Dewan Adat Dayak)

Ira Patriani¹, Bernardo Eben Navire²

*Lecturer of the Political Science, Faculty of Social and Political Sciences,
Universitas Tanjungpura Pontianak, email: ira.patriani@fisip.untan.ac.id*

*Student of the Political Science, Faculty of Social and Political Sciences,
Universitas Tanjungpura Pontianak, email: iambennav@gmail.com*

Correspondence email: iambennav@gmail.com

Received: 15/06/2022. Revised: 19/06/2022. Published: 27/06/2022

Abstract

This study examines the form of voting behavior of the Dayak community in the election of Governor and Deputy Governor of West Kalimantan in 2018. This type of research uses a qualitative descriptive method. The data collection technique is through interviews and documentation at the Dayak Customary Council. The research findings show that the voting behavior of the Dayak community tends to lead to primordial voters.

Keywords: Dayak Customary Council; Indigenous People; Voter Attitudes

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bentuk perilaku pemilih komunitas masyarakat Dayak dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2018. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi pada Dewan Adat Dayak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perilaku pemilih masyarakat Dayak cenderung mengarah pada pemilih primordial.

Kata kunci: Dewan Adat Dayak; Masyarakat Adat; Perilaku Pemilih

Pendahuluan

Secara umum politik itu dapat dikatakan bagian dari kehidupan manusia. Dalam artian segala perbuatan ataupun aturan-aturan yang mengatur adalah termasuk produk politik itu sendiri. Masyarakat yang berperan serta dalam rangka merencanakan, menentukan, melaksanakan dan tercapainya perwujudan dari masyarakat/kebijakan yang direncanakan.

Perilaku ini juga didasari dari kesadaran diri sendiri untuk mau turun aktif mengubah suatu sistem, dan membenahi serta memperbaiki suatu sistem yang sudah ada. Perilaku politik yang bagus juga meningkatkan partisipasi politik. Jika berbicara mengenai politik, pasti tidak terlepas dari proses demokrasi didalamnya.

Organisasi etnis Dewan Adat Dayak (DAD) yang ada di seluruh wilayah di pulau Kalimantan ini dibentuk sebagai wadah musyawarah yang ditujukan untuk masyarakat bersuku bangsa Dayak di Kalimantan Barat. Terbentuknya DAD ini melalui musyawarah nasional oleh tokoh-tokoh Dayak yang ada di seluruh wilayah Kalimantan pada tahun 2001 silam

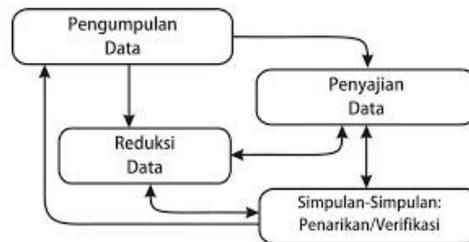
Perumusan perilaku politik bisa dilakukan yakni hubungan dari masyarakat dengan pemerintah, diantar individu dan kelompok masyarakat, diantara lembaga-lembaga pemerintahan. Perilaku politik yakni terkait proses membuat, melaksanakan dan menegakkan sejumlah keputusan politik. Sebagai bagian dari interaksi dan perilaku bisa dicermati akan berwujud perilaku politik, yakni perilaku yang berkaitan dengan proses politik. (Surbakti, 2010:20).

Sebuah pemerintahan bisa dikatakan demokratis bila pemerintah yang berkuasa secara teratur menawarkan kesempatan konstitusional untuk persaingan damai untuk kekuatan politik dari beberapa kelompok orang yang berbeda dengan tidak membedakan satu kelompok dari yang lain. Kepala daerah ialah jabatan public atau jabatan politik, dimana tugasnya memimpin birokrasi yang menggerakkan roda pemerintahan. Fungsi pengambilan kebijakan dijalankan oleh kepala daerah melalui tiga fungsi negara, pembangunan, pelayanan public, dan perlindungan. Menyelenggarakan pemilukada secara langsung dinilai merupakan sebuah peningkatan dalam berdemokrasi tingkat lokal. Selain itu, Surbakti juga memaparkan bahwa tidak seluruh kelompok masyarakat atau individu melakukan aktivitas politik, terdapat pihak yang menaati perintah dan juga terdapat pihak yang memerintah, dimana yang satu menantang dan yang satunya mempengaruhi, serta ini pada akhirnya menghasilkan suatu bentuk kompromi.

Kondisi politik rakyat dapat mengalami perubahan sesuai keadaan dan kondisi yang mendasarinya. Hal tersebut tentunya sangat memungkinkan lantaran tiap insan & rakyat hidup pada sebuah ruang yang bergerak. Berbagai perilaku politik masyarakat yang berubah terutama menyangkit partisipasi politik kerap diperlihatkan oleh mereka, diantaranya sebab timbulnya kesadaran kelas, perubahan sistem politik, program yang ditawarkan pasangan calon, berkurangnya tingkat ketergantungan seseorang, masuknya orang yang berpengaruh pada suatu partai politik, serta lainnya. (Huntington & Nelson, 1994:116-127).

Metode Penelitian

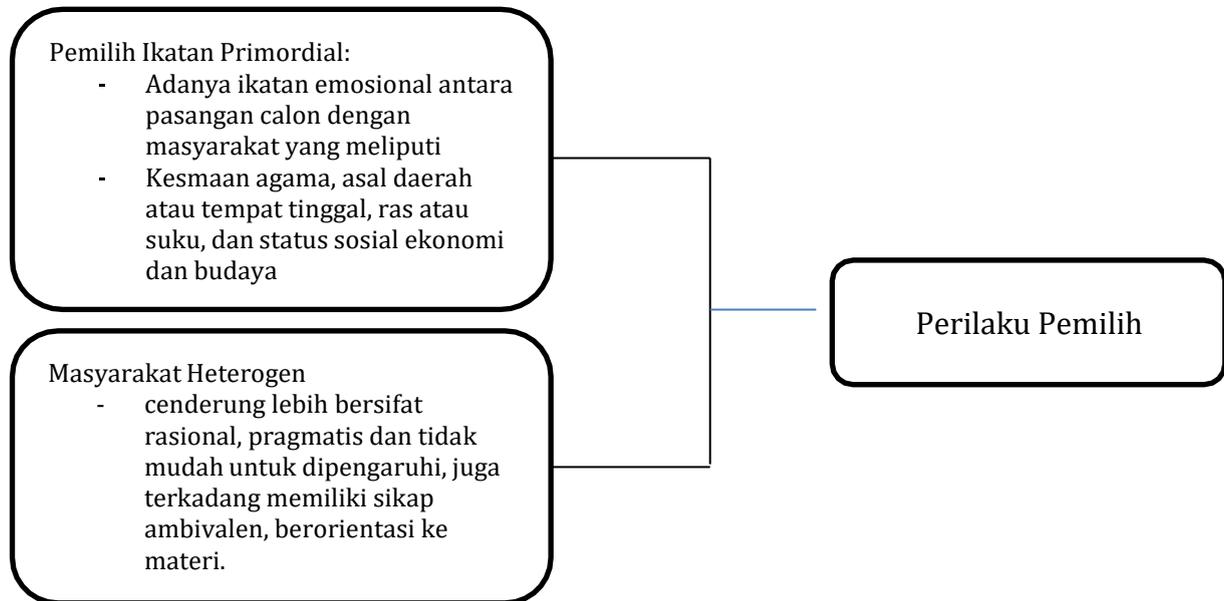
Jenis penelitian ini berupa penelitian deskriptif menggunakan metode pendekatan kualitatif. Ini ialah penelitian yang membuah data deskriptif terkait kata-kata lisan maupun tertulis, serta perilaku yang bisa dilihat dari individu yan dikaji. (Taylor dan Bogdan, 2011:170). Dalam pengamatan oleh Kirk dan Miller bahwa penelitian kualitatif yakni penelitian tanpa menghitung.



Gambar 1.
Model Analisis Data

Penelitian kualitatif tidak mengambil jarak dengan objek yang diteliti, hubungan dibangun atas dasar kepercayaan. pengertian yang dipaparkan oleh David Williams yakni pengumpulan data pada latar alamiah dengan suatu metode alamiah, serta dilaksanakan oleh peneliti atau orang yang tertarik secara alamiah.

Terbentuknya perilaku ini dibedakan menjadi perilaku baik dan tidak baik, perilaku yang baik dimana masyarakat yang mengikuti pemilu ataupun proses politik sesuai dengan aturan main yang berlaku didalam berpolitik. Sedangkan perilaku yang tidak baik adalah perilaku masyarakat yang terbentuk itu karena sentiment antar masyarakat maupun terbentuk karena elit politik yang cenderung mengacaukan keseragaman proses berpolitik, dalam kasus ini adalah pemilihan umum. Sebagai contoh perilaku yang tidak baik/menyimpang ini dikenal juga sebagai perilaku elit politik yang tidak demokratis. Perilaku elit politik yang tidak demokratis diantaranya: (i) keberpihakan rezim pilkada pada salah satu pasangan calon, (ii) paksaan terhadap organisasi-massa netral, (iii) pembelian suara (*money politics*), (iv) memafaatkan *ghost voters*, dan lain-lain.



Gambar 2.
Perilaku Pemilih

Hasil dan Pembahasan

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah anggota-anggota pengurus Dewan Adat Dayak dan masyarakat di Desa Parit Baru. Dijelaskan pada aturan terkait pemilihan umum yang termuat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 bahwasanya “Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”. Sebagai instrument yang dimanfaatkan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis, maka dengan sistem pemilukada secara langsung diharapkan terwujudnya sebuah kedaulatan rakyat dalam pemerintahan terealisasi secara menyeluruh.

Di Kalimantan Barat khususnya hal ini menjadi momen masyarakat untuk mengikuti pesta demokrasi dan juga sebagai pergantian posisi Drs. Cornelis M.H dan Christiandy Sanjaya yang sudah menjabat menjadi gubernur selama 10 tahun atau 2 periode. Jadi tahun 2018 ini pada kontestasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat beserta wakilnya ada 3 kandidat yang resmi/loos untuk bersaing, yaitu:

Tabel 1.
Kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Barat tahun 2018

No Urut	Bakal calon Gubernur Kalimantan Barat	Bakal calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat
1	Drs. Milton Crosby, M.Si	H. Boyman Harun, S.H
2	Dr. Karolin Margret Natasa	Suryadman Gidot, M.Pd
3	H. Sutarmidji, S.H., M.Hum	Drs. H. Ria Norsan, M.M, M.H

Adapun hasil perolehan suara serta persentasi 3 pasangan calon tersebut dari hasil rekapitulasi suara oleh KPU adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Hasil Perolehan Suara

No	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara	Persentase
1	Drs. Milton Crosby, M.Si H. Boyman Harun, S.H	132.151 suara	6.65%
2	dr. Karolin Magret Natasa Suryadman Gidot, M.Pd	1.081.878 suara	41.79%
3	H. Sutarmidji, S.H., H.mHum Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H	1.334.512 suara	51.55%

Dari hasil diatas dapat dilihat perolehan suara terbesar dimenangkan oleh pasangan nomor urut 3 yaitu pasangan Sutarmidji dan Ria Norsan dengan 51.55%. Kemudian lanjut kepada pembahasan hasil wawancara peneliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori pemilih ikatan primordial dan masyarakat heterogen (cenderung bersifat rasional) oleh Ramlan Surbakti.

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan selama terjun kelapangan adalah, ikatan-ikatan identitas atau emosional masyarakat Dayak yang peneliti anggap itu sangat kuat. Dibentuk lembaga masyarakat adat Dayak yaitu Dewan Adat Dayak inilah salah satu contoh agar masyarakat Dayak dapat berhimpun dalam satu lembaga adat. Untuk itu, beberapa anggota DAD Kalimantan Barat serta beberapa masyarkat adat Dayak di desa Parit Baru menjadi informan dalam penelitian ini. Adapun daftar informan peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Daftar InformanPemilih Ikatan Primordialisme

No	Nama	Tanggal Wawancara	Keterangan
1.	Jakius Sinyor	1 Desember 2021	Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi KalimantanBarat
2.	Angeline Fremalco	7 Maret 2022	Ketua 4 Bidang Kesehatan,Pemberdayaan Perempuan dan Anak
3.	Adam	17 Desember 2021	Ketua Dewan Adat DayakParit Baru
4.	Kristian	15 Desember 2021	Kepala Bidang PolitikDewan Adat Dayak Provinsi
5.	Adrianus	1 Desember 2021	Anggota
6.	Agus	13 Desember 2021	Masyarakat desa Parit Baru
7.	Wilsen	13 Desember 2021	Masyarakat desa Parit Baru
8.	Yoris	10 Desember 2021	Masyarakat desa Parit Baru
9.	Oliva	9 Desember 2021	Masyarakat desa Parit Baru
10.	Alex	11 Desember 2021	Masyarakat desa Parit Baru

Pemilih primordial cenderung melihat adanya kesamaan atau ikatan emosional antara pemilih dan pasangan calon. unsur-unsur seperti agama, asal daerah atau tempat tinggal, rasa tau suku, dan kesamaan ideologi juga termasuk kedalam unsur penting ikatan emosional tersebut. Adanya hubungan emosional yang diantaranya adalah seorang kandidat memiliki latar belakang ikatan primordial yang sama dengan ikatan primordial yang ada di masyarakat. Seperti hasil wawancara yang peneliti dapatkan, dengan informan ketua umum DAD Kalimantan Barat bapak JS, beliau mengatakan:

“memang rata-rata mau dimanapun itu sudah tidak bisa dihindari lagi lah itu, karna apa dampak pemilu yang lalu itu kan memang banyak. Pun juga kalo ditanyai tentang itu ya susah juga kan gitu, disini lain mungkin ada orang yang kearah primordial, ada juga yang masih mengikuti entah itu organisasi, partai politik dan sebagainya. jadi itu relatiflah, kalo untuk saya sendiri sih memang waktu saat berada di ruang lingkup lembaga DAD itu primordial, tapi disesuaikan lagi, dalam forum-forum antar lembaga masyarakat itu kami juga lebih bersifat ke toleransilah, karena kita ada perbedaan di Kalimantan Barat ini.”

Kemudian peneliti bertanya juga mengenai sikap DAD dalam menghadapi pemilukada tahun 2018, bersama dengan ketua 4 Ibu AF, beliau mengatakan:

“DAD mempunyai sikap politik juga sebagai Dewan Adat Dayak tentu wajar rasanya jika pada saat itu DAD juga mempunyai sikap untuk mendukung salah satu calon, tapi bukan berarti langsung mengeluarkan maklumat untuk harus mengikuti seperti itu, tidak. Tapi memang DAD bersikap, karena memang kan ini Dewan Adat Dayak ya jadi saya rasa juga sangat wajar jika DAD memberikan dukungan kepada salah satu calon yangnotabene nya juga adalah orang Dayak.”

Dari pernyataan diatas diketahui memang di DAD sendiri tidak ada pengharusan dalam memilih, jadi semua pilihan diserahkan secara bebas kepada anggotanya.

Pemilih Masyarakat Heterogen (pemilih yang cenderung berorientasi pada sifat rasional)

Pemilih ini banyak dijumpai pada daerah yang masyarakatnya heterogen, hal tersebut berkaitan juga dengan lingkungan hidup dimasyarakat, dimana terdapat banyak perbedaan dan hidup berdampingan. Dalam arti mereka sudah bisa memandang secara lebih luas mengenai pemimpin yang cocok untuk memimpin daerahnya. Didalam masyarakat heterogen ini cenderung lebih bersifat pragmatis dan tidak mudah dipengaruhi dan terkadang memiliki sikap ambivalen, berorientasi ke materi.

Seperti hasil wawancara yang peneliti dapatkan, ada beberapa yang mengaku memilih secara rasional dengan melihat *track record* dan kemanfaatan dari pilihannya tersebut, berikut jawaban dari saurada A mengenai hal itu:

“aku pilih kemaren lebih ke rasional, karna kalo aku primoridialisme, pasti aku

pilih pak Milton, karna masih ada hubungan keluarga dengan beliau. Kalau alasannya aku pilih Karolin, karna beliau ada pengalaman di DPR RI, dengan begitu pasti mudah koneksinya dengan pemerintah pusat. Itu yang aku harapkan waktu pilih Karol, supaya adanya akses lebih mudah ke pemerintah pusat. Kalau misalkan ade mau mobilitas ini itu, yang memang perlu bantuan dari pusat, kan bisa cepat terlaksananya pembangunan atau segala macam. Jadi tetap aku pertimbangkan jugalah hal itu.”

Kemudian dilanjutkan dengan bapak A selaku ketua DAD Sungai Raya mengatakan bahwa:

“Kalau berbicara rasional semua memang pasti punya pertimbangannya masing-masing, cuman ya memang kalau udah ada ikatan emosional, kadang masyarakat juga tetap memilih yang sama dengan dia. Ndak bisa dihindari lagi la sebenarnya itu, ke rasionalan itu ndak hanya sebatas melihat track record saja menurut saya, karna kalo misalnya kan yang maju ada Dayak, ada Melayu, ada Cina, itu kalo kite pilih misalkan yang orang Melayu, apakah kita rasional? Belum tentu, same juga kalo milih sesame Dayak, apakah uda langsung tercap primordial? Kan ndak gitu, kadang memang pilihan yang tepat itu bisa saja yang sama dengan kite latar belakangnye kan, jadi ndak semuene itu rasional ato primordial, gitula menurut saya.”

Dari hasil yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa dalam memilih tentu masyarakat bisa mempertimbangkan pertimbangan pribadi masing-masing, namun tetap tidak bisa dihindari adanya ikatan emosional dalam mengambil pilihan tersebut, semua tergantung perspektif dari masyarakat masing-masing.

Simpulan

Pada dasarnya ikatan primordialisme atau juga dapat dikatakan ikatan emosional memang sudah ada, masyarakat memiliki keterikatannya masing-masing, terlepas itu kesamaan suku, adat dan budaya serta agama. Satu perkumpulan organisasi juga dapat menjalin ikatan didalamnya, hal-hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 yang lalu, Dewan Adat Dayak bersikap netral dan turut mengedukasi masyarakat dalam menanggapi berita-berita hoax yang bisa saja menyerbarluaskan isu-isu perpecahan. Selain itu DAD beserta organisasi masyarakat adat besar lainnya yang ada di Kalimantan Barat bersatu dalam persatuan yang disebut sebagai perkumpulan Merah Putih.

Kemudian dari keterangan yang peneliti dapatkan saat wawancara dengan ketua umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat, pak Jakius mengatakan bahwa DAD ada menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon, tapi ditegaskan bahwa DAD tidak ikut berpolitik praktis, dalam arti tidak ikut dalam tim sukses ataupun kampanye politik. Dalam memilih, anggota DAD yang peneliti wawancara kompak menjawab bahwa di DAD walaupun ada sikap pernyataan dukungan, tetapi untuk memilih, anggota nya dibebeaskan dalam memilih sesuai hati nurani mereka, dan tidak diharuskan untuk memilih salah satu pasangan calon. Untuk masyarakat desa Parit Baru juga diketahui sebagian besar informan yang diwawancarai cenderung memilih berdasarkan adanya ikatan primordial/kesamaan ras atau suku dengan pasangan calon yang dipilih. Dan diketahui bahwa tidak adanya pengaruh dari Dewan Adat

Dayak kepada masyarakat dalam menentukan pilihan.

Berdasarkan sifat rasional dalam memilih, dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, perilaku pemilih anggota Dewan Adat Dayak yang sudah peneliti paparkan diatas menyatakan bahwa memang dalam memilih, mereka tidak terlepas dari adanya ikatan primordialisme. Dan mereka juga mengatakan alasannya, bahwa walaupun demikian, mereka tetap mempertimbangkan kinerja serta rekam jejak pasangan calon yang dipilihnya tersebut.

Mereka juga satu suara bahwa siapapun pemimpin yang terpilih, DAD dan masyarakat Dayak tetap akan mendukung kebijakan pemerintah yang berjalan, namun tetap mengawasi jalannya pemerintahan itu. Untuk informan masyarakat Dayak di Desa Parit Baru juga kurang lebih sama dengan anggota DAD, bahwa mereka memilih juga melihat kesamaan suku, dan ada juga pemilih pemula yang masih mengikuti arahan orang tua. Dan dari mereka juga memberikan pandangan bahwa DAD tetap lebih baik sebagai ormas masyarakat Dayak, dan kalau bisa jangan secara langsung untuk turun dalam berpolitik, dan diharapkan tidak menjadi kendaraan politik.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih pada bapak Jakius Sinyor selaku ketua umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan barat dan masyarakat desa Parit Baru yang telah bersedia dalam membantu menyelesaikan penelitian ini. Juga kepada editor Parabela yang telah mempublikasikan karya ini.

Referensi

Akbar, Idil. (2016). *Pilkada serentak dan geliat dinamika politik dan Pemerintahan lokal indonesia*. 99-101

Budiardjo, M. (2007). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Dominika, E. (2015). Perilaku Pemilih Etnis Dayak Pada Pilkada Serentak di Kabupaten Sintang Desa Kemantan Kecamatan Sepuak Hulu Tahun 2015. *Skripsi*.

Gaffar, A. (2006). *Politik indonesia*. Pustaka pelajar.

Harahap, R. R. (2014). Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Kabupaten (Studi Kecamatan Dayun, Dapil II Kabupaten Siak, Tahun 2014). 3-6.

Habibi, Muhammad. (2019). Analisis Politik Identitas Di Indonesia 13,17-20.

Hidayat, C. (n.d.). Partisipasi Politik dan Pemilihan Umum. 5-11.

Kavanagh, D. (2013). *Kebudayaan Politik*. Bantul, Yogyakarta.



- Khotib. (2018). Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Di Kecamatan Kuala Mador B. *Skripsi*.
- Lussua. (2012). Fungsi Lembaga Adat Dayak Sebagai Ruang Public (Studi Terhadap Fungsi Lembaga Adat Dayak Sebagai Ruang Public Dan Penggunaannya Oleh Masyarakat Dayak Dalam Menolak Kehadiran FPI Di Kalimantan Tengah). *Skripsi*.
- Lussua. (2013). Fungsi Lembaga Adat Dayak Sebagai Ruang Publik (Studi Terhadap Fungsi Lembaga Adat Dayak Sebagai Ruang Publik dan Penggunaannya Oleh Masyarakat Dayak dalam Menolak Kehadiran FPI di Kalimantan Tengah). 4-9.
- Moeleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasrudin, J. (2018). Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Jurnal Studi Agama-Agama*, 36-39.
- Nazir. (Metode Penelitian). 2012. Ghalia Indonesia.
- Prihatmoko, J. J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharzial, S. M. (2011). *Pemilukada Regulasi Dinamika Dan Konsep Mendatang*. Pt Rajagrafindo Persada.
- Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. PT Grasindo. Surbakti,
- R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Suryabata, S. (2012). *Metodologi Penelitian*. PT Rajagrafindo Persada.
- Sutinah. (2011). *Metode Penelitian Sosial, berbagai alternatif pendekatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Vevekananda, Denayi Swami. (2017). Perilaku Politik Dan Kekuasaan Politik (Studi Perpindahan Partai Politik Basuki Tjahaja Purnama Dalam PerpolitikanIndonesia). Skripsi